

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan semakin banyaknya perseroan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), laporan keuangan menjadi semakin penting dalam kehidupan perusahaan. Pelaporan keuangan ialah jenis media yang digunakan oleh perusahaan untuk memberi tahu orang-orang yang membutuhkannya tentang keadaan organisasi. Begitu banyak pemangku kepentingan yang tertarik dengan hasil kinerja perusahaan, laporan keuangan diharuskan di audit demi menghindari asimetris informasi dan memastikan kewajaran. Untuk itu diperlukan seorang auditor sebagai pihak yang tidak memihak yang mampu bertindak sebagai mediator antara prinsipal (pemegang andil) dan agen (manajer) yang mengelola perusahaan.

Dalam mengaktualisasikan laporan keuangan tersebut, perusahaan menyewa auditor eksternal dari KAP (Kantor Akuntan Publik) agar melaksanakan audit dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan organisasi. Akibatnya, laporan keuangan dapat diandalkan tanpa takut salah saji material. Menjadi seorang auditor eksternal harus tidak memihak dan objektif saat mengevaluasi kewajaran akun keuangan. Selanjutnya, auditor tidak diperbolehkan memiliki keterkaitan atau hubungan yang dalam dengan orang atau klien di perusahaan tersebut. Jika auditor memiliki hubungan dengan perusahaan klien, independensi dan objektivitas auditor akan diragukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus berpegang pada kode etik profesi. Namun, ada berbagai insiden auditor yang menyebabkan pelanggaran, seperti PT Asuransi Jiwasraya, menghadapi kesulitan likuiditas, akibatnya modal perusahaan dinyatakan minus Rp 23,92 triliun pada bulan September 2019. Selanjutnya, Jiwasraya memerlukan dana sebesar Rp 32,89 triliun demi pemulihan usaha. *PricewaterhouseCoopers* (PWC) mengeluarkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) untuk laporan konsolidasi perseroan Asuransi Jiwasraya dan anak perusahaan per 31 Desember 2016. Berdasarkan laporan keuangan audited, laba net pada tahun 2016 sebesar Rp 1,7 triliun, naik 37% dari tahun sebelumnya.

Untuk laporan keuangan konsolidasi yang belum diterbitkan. Sedangkan di website Jiwasraya, informasi rekening-rekening keuangan tidak terkonsolidasi dan sudah diaudit oleh PWC, dengan laba bersih Rp. 2,1 triliun (Wajar Tanpa Pengecualian) di tahun 2016 dan Rp 328 miliar di tahun 2017, (opini dengan modifikasi).

Sesuai syarat kesehatan perusahaan asuransi, tingkat solvabilitas PT Asuransi Jiwasraya masih tergolong aman, yakni 200 persen pada 2016 dan 123 persen pada 2017. Direktur Utama (Dirut) Jiwasraya Hendrisman Rahim bersama dengan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo sama-sama dipecat di tahun 2018. Konsumen kemudian mulai melakukan pemecatan. mendistribusikan JS Saving Plan karena dia merasakan bau busuk dari direktur lama. Kemudian, di bulan Mei 2018, pemegang saham Jiwasraya memilih Asmawi Syam sebagai presiden dan direktur. Dalam bimbingannya, direksi yang baru membuat laporan atas ketidaksesuaian laporan keuangan ke Kementerian BUMN. Jiwasraya kemudian mengumumkan pada Oktober 2018 tidak mampu membayar polis Rp 802 miliar. Diduga ada kecurangan dalam pengelolaan investasi Jiwasraya dalam hal ini. Audit BPK dari 2015 sampai 2016 adalah acuan. Berdasarkan audit, investasi Jiwasraya di PT Hanson International Tbk (MYRX) medium term notes (MTN) sebesar Rp 680 miliar ada risiko tidak dibayar. Menurut laporan hasil audit dari BPK, korporasi ditemukan melakukan investasi di aset-aset yang berisiko untuk memaksimalkan hasil, sehingga tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Menyusul kasus PT SNP Finance yang melibatkan auditor KAP Satrio Bing, Eny & Rekan dalam aksi pemalsuan laporan keuangan 2018 (Deloitte Indonesia). Akibatnya, KAP Deloitte Indonesia dianggap telah melanggar konsep integritas dengan memberikan opini WTP meskipun laporan keuangan yang diberikan adalah palsu, khususnya pemalsuan piutang penjualan palsu sebagai jaminan kepada 14 bank (kreditur PT SNP).

Lalu, ada kejadian di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Kementerian Keuangan menyikapi banyak kegagalan Akuntan Publik (AP) saat melakukan

audit atas keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia di 2018. Akibatnya, Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK) menjatuhkan sanksi kepadanya.

Salah satu kegagalan yang dilakukan oleh AP ialah tidak menerima cukup bukti audit dalam melakukan pengujian perlakuan akuntansi yang sesuai menurut isi dari perjanjian transaksi tersebut. Hal ini, merupakan pelanggaran terhadap SA 500. Bukti audit dibutuhkan demi mendukung pandangan dan laporan auditor, menurut SA 500 IAPI tentang bukti audit. Auditor merancang dan menjalankan prosedural audit untuk mendapat bukti yang cukup dan tepat untuk membuat kesimpulan yang memadai sebagai dasar pemutusan opini audit. Sumber bukti audit lainnya termasuk audit sebelumnya, metode pengendalian kualitas perusahaan untuk penerimaan dan kelangsungan klien, dan catatan keuangan entitas, yang merupakan sumber paling penting.

Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada AP dan KAP yang melakukan audit PT Garuda Indonesia. Mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran besar yang dapat berdampak kepada pendapat Laporan Auditor Independen (LAI). Selanjutnya KAP yang melakukan audit keuangan Garuda Indonesia mendapat teguran tertulis dengan kewajiban penguatan Standar Pengendalian Mutu dalam KAP, dan BDO *International Limited* melaksanakan review ke KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Gatot Trihargo, Wakil Menteri BUMN Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan, menyatakan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah melakukan perubahan manajemen Garuda dengan mengganti KAP dan auditor internal dalam mengelola keuangan perusahaan, bahkan sebelum sanksi. diberlakukan oleh OJK dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan penjelasan fenomena di atas, peneliti memilih untuk menganalisis beberapa elemen yang dapat memberikan dampak kepada pergantian auditor.

Banyak penelitian tentang pergantian auditor sudah dilaksanakan sejauh ini, dan masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini, disebabkan oleh fakta bahwa penyelidikan sebelumnya menghasilkan hasil yang tidak meyakinkan. Pergantian manajemen ialah salah satu dari sekian banyaknya variabel yang mempunyai dampak bagi perubahan auditor yang disebutkan dalam penelitian ini.

(Saputra, 2017), (Ilhamsyah et al., 2020), (Manto & Lesmana Wanda, 2018), (Aini & Yahya, 2019), dan (Sihombing et al., 2020) menemukan bahwa perubahan manajemen mempengaruhi pergantian auditor. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan temuan (Hidayati & Jatiningsih, 2019), (Aprilia & Effendi, 2019), (Kaamilah et al., 2020), (Adli & Suryani, 2019), dan (Najwa & Syofyan, 2020) yang menunjukkan bukti pergantian manajemen tidak memiliki dampak kepada pergantian auditor.

Lalu, Opini audit memiliki pengaruh pada pergantian auditor korporasi, menurut penelitian (Kaamilah et al., 2020), (Aini & Yahya, 2019), dan (Sihombing et al., 2020). Hal ini bertolak belakang dengan temuan (Ilhamsyah et al., 2020) dan (Hidayati & Jatiningsih, 2019) yang menyatakan opini audit tidak memiliki dampak kepada rotasi auditor.

Kemudian ukuran KAP, berdasarkan penelitian Besar kecilnya KAP berpengaruh terhadap auditor, menurut penelitian (Manto & Lesmana Wanda, 2018) dan (Hidayati & Jatiningsih, 2019). Pernyataan tersebut bertentangan dengan temuan (Maemunah & Nofryanti, 2019) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak memberikan dampak/pengaruh kepada pergantian auditor.

Perubahan auditor merupakan topik yang dipilih untuk diteliti karena banyak elemen yang menjadi pengaruh perubahan auditor suatu korporasi. Namun, ada kontradiksi dari hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pergantian auditor terkonsentrasi pada organisasi manufaktur, sehingga peneliti memilih menggunakan perusahaan sektor jasa (perusahaan swasta). Perusahaan swasta lebih dipilih karena perusahaan BUMN yang terdapat di BEI hanya sedikit sehingga tidak bisa dijadikan sampel penelitian. Lalu, untuk variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya juga sudah terlalu sering untuk digunakan, seperti: didalam penelitian (Arisudhana, 2017), (Apriyanti & Hartanty, 2016), (Ilhamsyah et al., 2020), (Hidayati & Jatiningsih, 2019) dan (Aini & Yahya, 2019) menggunakan variabel ukuran perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan terjadinya rotasi auditor berdasarkan riset sebelumnya antara lain adalah opini audit, ukuran perusahaan, dan *audit delay*. Penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang juga melakukan

penelitian tentang auditor switching/pergantian auditor dan menggunakan sampel penelitian perserikatan sektor jasa (perusahaan swasta) yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

Selain itu, di beberapa penelitian sebelumnya seperti di dalam penelitian (Adli & Suryani, 2019) hanya di perusahaan pertambangan sehingga disarankan untuk menggunakan perusahaan sektor lain. Lalu, di penelitian (Aprilia & Effendi, 2019) juga mendapat saran untuk menggunakan perusahaan sektor lain misalnya perusahaan sektor keuangan. Berikutnya di penelitian (Saputra, 2017) memberikan pertimbangan untuk menggunakan faktor lain yang bisa memberikan perubahan kepada pergantian auditor seperti ukuran KAP.

Oleh sebab itu, peneliti akan menyelidiki apakah elemen seperti perubahan manajemen, opini audit dan ukuran KAP memiliki pengaruh kepada perubahan auditor. Penelitian ini selain didukung oleh penelitian sebelumnya juga didukung dengan adanya beberapa fenomena pergantian auditor, seperti terlihat pada PT Asuransi Jiwasraya, PT SNP Finance, dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Berlandaskan informasi yang sudah dijelaskan, peneliti memilih melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Manajemen, Opini Audit dan Ukuran KAP Terhadap Perubahan Auditor”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran dari latar belakang dan kasus diatas, peneliti memiliki rumusan masalah di dalam penelitian ini seperti:

1. Apakah Pergantian Manajemen memiliki dampak kepada Pergantian Auditor?
2. Apakah Ukuran KAP memiliki dampak kepada Pergantian Auditor?
3. Apakah Opini Audit memiliki dampak kepada Pergantian Auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertumpu pada rumusan masalah yang sudah disebutkan, tujuan melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian dan mengetahui dampak Pergantian Manajemen terhadap Pergantian Auditor.

2. Melakukan pengujian dan mengetahui dampak Ukuran KAP terhadap Pergantian Auditor.
3. Melakukan pengujian dan mengetahui dampak Opini Audit terhadap Pergantian Auditor.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang diteliti, ditemukan manfaat di penelitian ini bisa dijabarkan seperti:

1) Manfaat akademik

Periset mengharapkan hasil dari riset ini bisa menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya dan bisa berkontribusi memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pergantian manajemen, opini audit dan ukuran KAP kepada rotasi auditor serta, menjadi sarana dalam meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan elemen yang bisa menyebabkan pergantian auditor.

2) Manfaat Praktis

Penelitian bisa memberikan manfaat untuk para pimpinan rekan KAP di Indonesia dalam meningkatkan kualitas audit serta memperhatikan keadaan auditor dalam melaksanakan penugasan audit supaya kualitas audit tetap terjaga keandalannya.